

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk mengelola sebuah instansi yang sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap instansi harus dapat mengelola sumber daya yang ada di instansi tersebut, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Salah satu instansi yang mesti mengelola keuangan dengan baik ialah instansi pemerintah. Mardiasmo (2014) mengatakan, instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangan, diperlukan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, keuangan pusat maupun daerah di harapkan dapat di kelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Polri sebagai salah satu organisasi pelayanan publik atau organisasi Non Departemen yang setingkat dengan Kementerian dan Lembaga juga melakukan perubahan atau reformasi. Ini terlihat dengan dipisahkannya TNI dan Polri melalui

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan lahirnya UU tersebut, Polri seolah-olah terlahir kembali dengan melakukan banyak perubahan kedalam baik dari aspek struktural, intrumental dan kultural. Diterbitkan keputusan Kapolri No.Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Replubik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannnya, dalam hal ini peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka penilai akuntabilitas dan memenuhi keputusan ekonomi agar terwujudnya transparansi serta akuntabilitas, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan standarakuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, Sumiyati (2008).

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan di terapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat departemen-departemennya maupun di

pemerintahan daerah dan dinasny. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Singkali dan Widuri, 2014).

Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama (Pamungkas, 2012). Jannaini (2012) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategi organisasi. Kinerja organisasi juga menunjukkan bagaimana proses untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan kinerja organisasi tidak terlepas dari pengawasan internal dari organisasi itu sendiri. Pelaksanaan ini akan menghasilkan Polri yang professional, modern, dan bermoral. Dengan demikian meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri yang professional, modern, dan bermoral, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun masalah yang dihadapi Polri sampai saat sekarang bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tersebut.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting dalam setiap melakukan atau orang yang menerapkan standar akuntansi pemerintah tersebut. Yang dimaksud dengan kualitas sumber daya manusia ialah, kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia yaitu mutu dari tenaga kerja yang menyangkut kemampuannya, baik berupa kemampuan fisiknya, kemampuan intelektualnya (pengetahuan), serta kemampuan psikologisnya (mental) dalam melakukan sebuah pekerjaan terutama seseorang yang bekerja dibawah instansi pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polda Sumbar, penulis menemukan bahwa sistem akuntansi yang digunakan berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan yang aktual. Bagian keuangan Polda Sumatera Barat menggunakan sistem akuntansi berbasis aplikasi seperti SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) dan SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi). Aplikasi tersebut digunakan untuk pelaporan bagaimana keadaan keuangan Satbrimbob Polda Sumbar setiap bulannya.

Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengendalian internal dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Barat guna melihat sejauh mana menjalankan kinerjanya. juga memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada personil yang berada di bidang keuangan guna meningkatkan kualitas personil agar bisa memahami lebih lanjut tentang tanggung jawab, tugas, dan fungsi dari bidang keuangan Polda Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian ringkas latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti kembali tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi, terhadap kinerja manajerial. Oleh sebab itu, peneliti melakukan modifikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Afrina (2015) tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru., penelitian Fitrawati, dkk (2017) tentang pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dan penelitian yang telah dilakukan oleh Safitri (2018) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut, pada penelitian kali ini peneliti memodifikasi ketiga penelitian tersebut dengan mengambil setiap variabel dependen yang ada pada penelitian tersebut. Diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penelitian yang senada terhadap topik ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?

3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris;

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja?
3. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Bagi praktisi
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian di bidang akuntabilitas kinerja dalam materi perkuliahan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dibidang akuntabilitas.
2. Bagi akademis
 - a. Memberikan tambahan informasi terhadap akuntan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya
 - b. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Polda Sumatera Barat dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi tentang kerangka teori, teori agency, akuntabilitas kinerja, sistem akuntansi, pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, variabel dependen dan variabel independen.

Bab empat merupakan analisis hasil dan pembahasan, tingkat pengambilan data responden, statistik deskriptif, hasil pengujian instrumen data, hasil pengujian validitas, hasil pengujian reliabilitas, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian normalitas, heteroskedastisitas, hasil pengujian multikolinieritas, hasil uji hipotesis.

Bab lima penutup, kesimpulan penerapan sistem akuntansi, pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja, keterbatasan penelitian, saran penelitian.